



Kegagalan Konsolidasi dan Politik Program: Dinamika Kekalahan Har-Guntur dalam Pilkada Kota Jambi 2024

Irgi Ahmad Maulana Ibrahim¹, Ian Pasaribu^{1*}, Galank Pratama¹, Nasuhaidi¹

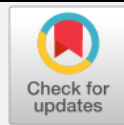
¹ Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jambi, 36361, Mendalo - Indonesia

*Korespondensi: ianpasaribu@unja.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

31 Maret 2026



Artikel dengan akses terbuka

Hak Cipta© 2026 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

Cantuman Sitasi:

Ibrahim, I. A. M., Pasaribu, I., Pratama, G., & Nasuhaidi. (2025). Kegagalan Konsolidasi dan Politik Program: Dinamika Kekalahan Har-Guntur dalam Pilkada Kota Jambi 2024. *Journal of Politics and Democracy*, 5(2), 58-70.

<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v5i1.114>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kekalahan pasangan Har-Guntur dalam Pilkada Kota Jambi 2024 dengan menekankan pada interaksi antara faktor internal kandidat dan keunggulan strategi lawan. Berangkat dari fenomena tingginya visibilitas politik yang tidak sepenuhnya diikuti oleh partisipasi elektoral serta terbatasnya alternatif kandidat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap data survei, pemberitaan media, dan dinamika kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekalahan Har-Guntur tidak disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari lemahnya konsolidasi tim pemenangan, kurang optimalnya mesin partai, serta strategi komunikasi politik yang tidak mampu membangun resonansi dengan kebutuhan pemilih. Di sisi lain, pasangan Maulana-Diza berhasil memanfaatkan keunggulan strategis melalui penyajian program konkret, penguatan citra personal yang dekat dengan masyarakat, serta pemanfaatan media komunikasi secara lebih efektif. Kesenjangan elektabilitas yang signifikan bahkan telah terbentuk sebelum hari pemungutan suara, menandakan adanya dominasi politik yang terbangun secara sistematis. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks politik lokal, kemenangan elektoral tidak hanya ditentukan oleh dukungan struktural partai, tetapi juga oleh kemampuan kandidat dalam mengintegrasikan konsolidasi politik, komunikasi yang efektif, dan tawaran programatik yang relevan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian perilaku pemilih dan kompetisi elektoral di tingkat lokal dengan menunjukkan bahwa kekalahan kandidat merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling memperkuat.



Abstract

This study aims to explain the electoral defeat of the Har-Guntur pair in the 2024 Jambi City local election by emphasizing the interaction between internal candidate weaknesses and the strategic advantages of their opponents. Departing from the phenomenon of high political visibility that was not fully matched by electoral participation, as well as the limited availability of candidate alternatives, this research employs a qualitative approach through the analysis of survey data, media coverage, and campaign dynamics. The findings reveal that the defeat of Har-Guntur was not caused by a single factor, but rather by an accumulation of weaknesses, including poor consolidation of the campaign team, suboptimal performance of the supporting party machinery, and political communication strategies that failed to resonate with voters' needs. In contrast, the Maulana-Diza pair effectively leveraged their strategic advantages by offering concrete programs, strengthening a people-oriented personal image, and utilizing communication channels more effectively. A significant gap in electability had already emerged prior to election day, indicating a systematically constructed political dominance. These findings underline that in the context of local politics, electoral victory is not solely determined by structural party support, but also by a candidate's ability to integrate political consolidation, effective communication, and relevant programmatic offerings. This study contributes to the literature on voter behavior and local electoral competition by demonstrating that electoral defeat is the result of a complex interaction of multiple reinforcing factors.

Kata Kunci komunikasi politik; kekalahan elektoral; konsolidasi tim pemenang; perilaku pemilih; Pilkada Kota Jambi 2024

1. Pendahuluan

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca Reformasi 1998 telah mendorong transformasi signifikan dalam tata kelola politik, khususnya melalui penerapan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Mekanisme ini tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen prosedural untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga sebagai arena kompetisi politik yang mempertemukan kepentingan elit, strategi partai, serta preferensi pemilih dalam konteks lokal yang semakin dinamis. Dalam praktiknya, pilkada menjadi ruang di mana interaksi antara kekuatan struktural dan kultural berlangsung secara intens, sehingga hasil elektoral tidak selalu ditentukan oleh dominasi institusi formal semata. Sebagaimana ditegaskan oleh Marcus Mietzner, pilkada di Indonesia telah berkembang menjadi ajang persaingan yang mengedepankan personalisasi kandidat dan strategi mobilisasi dukungan yang adaptif terhadap konteks sosial masyarakat (Mietzner, 2015).

Dalam konteks politik lokal, setiap daerah memiliki konfigurasi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, sehingga strategi pemenangan kandidat tidak dapat digeneralisasi secara

seragam. Studi Edward Aspinall dan Ward Berenschot menunjukkan bahwa politik elektoral di Indonesia sangat dipengaruhi oleh relasi patronase, jaringan informal, serta distribusi sumber daya yang tidak merata (Aspinall & Berenschot, 2019). Namun demikian, dalam perkembangan mutakhir, muncul fenomena yang menunjukkan pergeseran penting, di mana dukungan partai politik besar tidak lagi menjadi jaminan kemenangan elektoral. Kandidat yang mampu membangun kedekatan emosional dengan pemilih, menghadirkan program yang konkret, serta mengelola komunikasi politik secara efektif justru lebih berpeluang memenangkan kontestasi. Fenomena ini sekaligus menantang asumsi klasik dalam studi politik bahwa kekuatan organisasi politik merupakan faktor dominan dalam menentukan hasil pemilihan.

Kecenderungan tersebut semakin terlihat dalam berbagai kasus pilkada di Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Sebagai ibu kota provinsi dengan tingkat heterogenitas sosial yang cukup tinggi, Kota Jambi memperlihatkan dinamika politik lokal yang kompetitif dan terbuka. Pilkada 2024 menjadi momentum penting yang mempertemukan berbagai kepentingan elit politik, partai pengusung, serta basis massa yang terfragmentasi. Dalam kontestasi tersebut, pasangan Har-Guntur awalnya dipandang sebagai kandidat dengan modal politik yang kuat, terutama karena didukung oleh partai besar. Namun, realitas elektoral menunjukkan hasil yang berbeda, di mana pasangan tersebut justru mengalami kekalahan signifikan dari pasangan Maulana-Diza. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang lebih menentukan dalam kompetisi politik lokal: apakah kekuatan mesin partai, figur kandidat, atau justru efektivitas program yang ditawarkan kepada pemilih.

Sejumlah kajian terdahulu telah menggarisbawahi bahwa kekalahan kandidat dalam pilkada tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya dukungan struktural, tetapi juga oleh kegagalan dalam membangun komunikasi politik yang resonan dengan kebutuhan masyarakat. Firmanzah menekankan bahwa strategi kampanye yang tidak selaras dengan aspirasi publik akan berdampak langsung pada menurunnya daya tarik elektoral kandidat (Firmanzah, 2012). Sementara itu, studi Allen Hicken mengenai politik klientelistik menunjukkan bahwa distribusi sumber daya dan kemampuan membangun jaringan patronase tetap menjadi faktor penting dalam memenangkan kontestasi, terutama di negara berkembang dengan struktur sosial yang masih patronal (Hicken, 2011). Faktor eksternal seperti dominasi lawan politik, keunggulan dalam pemanfaatan sumber daya, serta kemampuan membangun jaringan sosial yang lebih luas juga berperan signifikan dalam menentukan hasil pemilihan (Ufen, 2018). Vedi R. Hadiz menekankan bahwa relasi kekuasaan lokal yang dipengaruhi oleh oligarki dapat menciptakan ketimpangan kompetisi elektoral, di mana kandidat dengan akses sumber daya yang lebih besar memiliki peluang lebih tinggi untuk mendominasi arena politik (Hadiz, 2010). Dengan demikian, kontestasi pilkada tidak lagi sekadar pertarungan antar partai, melainkan kompetisi multidimensional yang melibatkan interaksi kompleks antara komunikasi politik, citra kandidat, kekuatan program, serta distribusi sumber daya politik.

Lebih jauh, literatur mengenai politik lokal Indonesia menunjukkan bahwa praktik patronase dan klientelisme masih menjadi variabel penting dalam menjelaskan perilaku pemilih. Aspinall dan Berenschot menegaskan bahwa relasi timbal balik antara kandidat dan pemilih sering kali menjadi basis dukungan elektoral yang kuat (Aspinall & Berenschot, 2019). Namun, Mietzner menunjukkan adanya pergeseran ke arah personalisasi politik, di mana figur kandidat dan strategi komunikasi memiliki peran yang semakin dominan dalam membentuk preferensi pemilih (Mietzner, 2015). Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik menguraikan bagaimana interaksi antara faktor patronase, personalisasi kandidat, dan

strategi komunikasi politik tersebut memengaruhi kekalahan kandidat, khususnya dalam konteks pilkada tingkat kota.

Penelitian ini berupaya menjelaskan kekalahan pasangan Har-Guntur dalam Pilkada Kota Jambi 2024 dengan menekankan pada interaksi antara kelemahan internal kandidat dan kekuatan strategi lawan. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu konsolidasi tim pemenangan, efektivitas komunikasi politik, serta kekuatan program yang ditawarkan dalam membentuk persepsi pemilih. Pendekatan ini penting untuk memahami bahwa kekalahan kandidat tidak terjadi secara tunggal, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor yang saling berinteraksi. Pendekatan ini menempatkan kekalahan elektoral sebagai konsekuensi dari kegagalan kandidat dalam mengintegrasikan dimensi organisasi, komunikasi, dan programatik secara simultan. Dalam konteks politik lokal yang semakin kompetitif, ketidakefektifan konsolidasi tim akan berdampak langsung pada lemahnya distribusi pesan politik, sementara komunikasi yang tidak adaptif terhadap kebutuhan pemilih akan mengurangi daya resonansi kampanye. Pada saat yang sama, program yang tidak konkret cenderung gagal membentuk persepsi publik yang positif.

Dalam konteks empiris Pilkada Kota Jambi 2024, fenomena tersebut tampak jelas ketika pasangan Har-Guntur berhadapan dengan pasangan Maulana-Diza yang mampu menawarkan program pembangunan yang lebih konkret serta memanfaatkan media komunikasi politik secara lebih efektif, terutama melalui media sosial dan jaringan kampanye langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi elektoral di tingkat lokal tidak lagi hanya bergantung pada popularitas kandidat atau dukungan partai, tetapi juga pada kemampuan dalam mengelola narasi politik dan mendistribusikan sumber daya secara strategis.

Dengan demikian, kajian mengenai kekalahan pasangan Har-Guntur menjadi relevan tidak hanya untuk mengidentifikasi kelemahan strategi kandidat, tetapi juga untuk memahami dinamika demokrasi lokal yang lebih luas. Penelitian ini membedah faktor internal seperti lemahnya konsolidasi tim pemenangan serta faktor eksternal seperti dominasi lawan politik, penetrasi media, dan persepsi masyarakat terhadap program kampanye. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perilaku pemilih di Kota Jambi terbentuk dalam konteks kontestasi politik yang kompetitif dan terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang melatarbelakangi kekalahan pasangan Har-Guntur pada Pilkada Kota Jambi 2024. Secara khusus, penelitian ini menguraikan peran faktor internal dan eksternal dalam memengaruhi hasil pemilihan, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dalam memahami pergeseran dinamika politik lokal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi kandidat dan partai politik dalam merumuskan strategi yang lebih adaptif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dalam kontestasi politik di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara komprehensif berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fenomena kekalahan pasangan Har-Guntur dalam Pilkada Kota Jambi 2024. Studi pustaka memungkinkan peneliti melakukan sintesis terhadap temuan akademik, data resmi, dan informasi media guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual

mengenai dinamika politik lokal. Menurut John W. Creswell, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014), sementara studi pustaka berfungsi sebagai dasar analisis konseptual dan empiris dalam penelitian sosial.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi KPU dan Bawaslu, artikel jurnal ilmiah, serta pemberitaan media daring yang kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis data yang berbeda. Analisis data dilakukan melalui sintesis tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif, sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles & Huberman, 1994). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait faktor-faktor yang memengaruhi kekalahan pasangan Har-Guntur dalam Pilkada Kota Jambi 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

Dinamika Politik Lokal Pilkada Walikota Jambi 2024

Pilkada Kota Jambi 2024 tidak hanya menjadi arena kompetisi bagi kandidat dan partai politik, tetapi juga menghadirkan dinamika sosial yang terlihat dari antusiasme masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Sejak masa kampanye dimulai, warga menunjukkan keterlibatan yang tinggi, baik melalui kehadiran dalam pertemuan tatap muka, pemasangan atribut kampanye di lingkungan sekitar, maupun diskusi informal di ruang publik seperti warung kopi, pasar tradisional, hingga media sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa politik lokal masih memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat, karena hasil Pilkada dinilai akan berimplikasi langsung terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.

Antusiasme masyarakat juga tercermin dalam partisipasi mereka pada survei dan jajak pendapat yang dilakukan lembaga independen. Data dari Public Trust Institute (PUTIN, 2024) menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat menentukan pilihan adalah program dan visi misi yang konkret, diikuti citra calon yang merakyat serta rekam jejak kinerja. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Jambi mulai menunjukkan sikap politik yang lebih rasional. Mereka tidak lagi hanya menilai kandidat dari janji politik yang ditawarkan, melainkan dari bukti aksi nyata dan kemampuan kandidat dalam menghadirkan solusi di tengah persoalan ekonomi dan pengangguran yang sedang melanda. Dengan demikian, preferensi politik masyarakat tidak hanya emosional, tetapi juga dipengaruhi pertimbangan pragmatis tentang siapa yang bisa membawa perubahan nyata bagi kondisi ekonomi lokal.

Kondisi sosial di lapangan juga memperlihatkan perbedaan respon antara kelompok yang pro terhadap kandidat tertentu dan kelompok yang bersikap kritis. Pendukung pasangan Maulana-Diza menunjukkan optimisme tinggi karena program mereka dinilai realistis dan mudah dirasakan manfaatnya, sementara pendukung Har-Guntur tetap menjaga soliditas meski menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pemilih. Bahkan laporan masyarakat terhadap dugaan kampanye Har-Guntur di tempat ibadah menunjukkan bahwa warga semakin aktif berperan sebagai pengawas sosial, bukan hanya sebagai penerima janji kampanye. Hal ini memperlihatkan kesadaran politik masyarakat yang semakin matang, di mana mereka ikut serta menjaga kualitas demokrasi.

Secara umum, respon masyarakat terhadap Pilkada Walikota Jambi 2024 cukup positif dari sisi keterlibatan politik, meskipun angka partisipasi pemilih mengalami penurunan. Lebih penting lagi, warga Kota Jambi kini menunjukkan kecenderungan memilih pemimpin yang mampu bekerja nyata, bukan sekadar pandai berjanji. Masyarakat semakin mengutamakan figur pemimpin yang memiliki kapasitas mencari solusi atas problem nyata, terutama dalam menghadapi hiruk-pikuk ekonomi, tingginya angka pengangguran, dan kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi lokal di Jambi bergerak ke arah yang lebih substantif, di mana pemilih semakin kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya.

Namun demikian, data KPU menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilwako Jambi 2024 justru mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Dari total daftar pemilih tetap, hanya 286.452 orang yang menggunakan hak pilihnya atau setara dengan 62,63%. Angka ini menurun cukup tajam dibandingkan dengan partisipasi Pilwako Jambi tahun 2018 yang mencapai 71,91% dari total pemilih sebanyak 380.559 orang (Tribun Jambi 2024). Penurunan ini mengindikasikan adanya gejala apatisisme politik di kalangan sebagian masyarakat Kota Jambi, meskipun antusiasme kampanye terlihat di ruang publik. Rendahnya partisipasi juga bisa ditafsirkan sebagai tanda bahwa masyarakat mulai kritis dan selektif, namun tidak semua termotivasi untuk hadir di bilik suara.

Temuan ini sejalan dengan laporan media lokal yang menyoroti rendahnya partisipasi warga. (Tribun Jambi 2024) mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kota Jambi masih rendah, dengan angka golput mencapai 37 persen. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa meskipun antusiasme kampanye cukup terasa di ruang publik, sebagian masyarakat masih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, juga mengakui rendahnya angka partisipasi pada Pilkada kali ini. Ia menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat hanya berada pada kisaran 62-63 persen. Namun, ia tidak dapat memastikan faktor apa yang menjadi penyebab rendahnya angka partisipasi tersebut. Menurutnya, KPU sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mulai dari sosialisasi hingga kegiatan bersama masyarakat. "Kalau faktornya perlu kajian lagi apa yang menjadi penyebab partisipasinya di angka itu, tapi yang pasti selama ini kita sudah berusaha untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih, kita terus sosialisasi, mengadakan kegiatan dengan masyarakat sebagai upaya meningkatkan masyarakat" (Tribun Jambi, 2024).

Rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Jambi 2024 menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi lokal masih menghadapi tantangan. Hal ini tidak hanya terkait dengan perilaku pemilih di hari pemungutan suara, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika politik di tingkat elit, khususnya dalam proses panjang seleksi kandidat yang akhirnya menentukan pilihan terbatas bagi masyarakat.

Dinamika politik lokal dalam Pilkada Walikota Jambi 2024 tidak hanya ditentukan oleh kontestasi elektoral saat kampanye, tetapi juga oleh proses panjang seleksi kandidat di tingkat partai politik. Pada tahap awal, muncul berbagai wacana tentang banyak calon potensial yang diprediksi maju, baik dari kalangan birokrat, tokoh masyarakat, maupun politisi partai. Namun, seiring berjalannya proses seleksi internal, partai-partai politik akhirnya hanya mengusung dua pasangan calon, yakni Har-Guntur dan Maulana-Diza. Situasi ini menandakan bahwa partai politik masih memegang peran sentral sebagai penentu pintu masuk kandidat dalam arena demokrasi elektoral (Afriandi, 2024).

Proses penyaringan yang ketat di internal partai memang mencerminkan adanya mekanisme seleksi yang dilakukan secara berlapis, mulai dari pertimbangan elektabilitas, dukungan finansial, hingga jaringan politik yang dimiliki calon. Namun, kenyataan bahwa hanya dua pasangan calon yang muncul pada akhirnya juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas demokrasi lokal. Demokrasi seharusnya memberikan ruang kompetisi yang lebih luas bagi masyarakat untuk memilih dari berbagai alternatif kandidat. Akan tetapi, keterbatasan jumlah pasangan calon justru mengindikasikan bahwa proses demokrasi di tingkat lokal masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan dominasi elit politik dalam menentukan siapa yang layak bertarung di arena Pilkada.

Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif teori kelembagaan politik yang menekankan bahwa partai politik sering kali berfungsi sebagai gatekeeper demokrasi. Mereka memiliki kewenangan besar untuk menentukan kandidat, yang pada satu sisi dapat menjaga stabilitas politik, namun di sisi lain berpotensi mengurangi tingkat kompetisi yang sehat. Dalam kasus Pilkada Kota Jambi, seleksi yang akhirnya hanya menghasilkan dua pasangan calon memperlihatkan dominasi partai dalam menutup ruang bagi calon independen maupun tokoh alternatif yang sebenarnya memiliki basis dukungan publik. Kondisi ini sejalan dengan analisis (Afriandi 2024) yang menyebutkan bahwa dinamika Pilkada Jambi 2024 memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga kualitas demokrasi. Demokrasi prosedural memang terlaksana dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi demokrasi substantif yang ditandai dengan kompetisi yang adil, keterbukaan akses bagi kandidat, serta adanya alternatif pilihan bagi pemilih masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Jambi, seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia, masih berhadapan dengan kendala struktural berupa dominasi elit partai politik. dinamika politik lokal Pilkada Walikota Jambi 2024 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan juga tentang bagaimana proses seleksi kandidat berlangsung. Munculnya hanya dua pasangan calon memperlihatkan bahwa demokrasi lokal masih menghadapi pekerjaan rumah besar, yaitu bagaimana membuka ruang kompetisi yang lebih inklusif, menghadirkan lebih banyak alternatif calon, dan pada akhirnya memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Dinamika politik lokal merupakan proses interaksi antara aktor politik, partai, dan masyarakat pemilih dalam arena kontestasi politik di tingkat daerah. Dalam konteks Pilkada, dinamika politik lokal mencakup faktor internal kandidat seperti strategi komunikasi, konsolidasi tim, dan kekuatan partai pengusung, serta faktor eksternal seperti persepsi publik, dominasi lawan politik, dan pengaruh media (Aspinall & Berenschot, 2019). Dinamika ini membentuk perilaku pemilih yang pada akhirnya menentukan hasil pemilihan.

Dalam Pilkada Kota Jambi 2024, dinamika tersebut tercermin dari bagaimana pasangan Maulana-Diza dan Har-Guntur membangun interaksi dengan masyarakat. Pasangan Maulana-Diza dinilai lebih berhasil menghadirkan citra sebagai sosok yang merakyat dan dekat dengan masyarakat. Hal ini memperkuat legitimasi personal mereka di mata pemilih. (Mietzner 2015) menegaskan bahwa dalam kontestasi politik lokal di Indonesia, personalisasi kandidat dan kedekatan emosional sering kali lebih menentukan dibanding sekadar dukungan partai besar. Sebaliknya, pasangan Har-Guntur gagal membangun citra yang kuat meskipun memiliki dukungan struktural dari partai besar seperti PDIP dan NasDem.

Fenomena ini diperkuat oleh hasil survei elektabilitas yang dirilis oleh Public Trust Institute (PUTIN) pada 26 September 2024. Survei yang dilakukan pada 12-17 September 2024

menunjukkan bahwa pasangan Maulana-Diza unggul dengan elektabilitas 69,30%, sedangkan Har-Guntur hanya 27,00%, sementara 3,70% responden belum menentukan pilihan. Angka ini mengonfirmasi bahwa dominasi pasangan Maulana-Diza sudah terbentuk bahkan sebelum hari pemungutan suara, sehingga memperlihatkan lemahnya penetrasi politik pasangan Har-Guntur.

Survei PUTIN juga mengungkap sumber utama informasi pemilih, yaitu baliho/poster/stiker/spanduk sebesar 25,30%, media sosial sebesar 23,30%, dan penyebaran informasi dari mulut ke mulut sebesar 19,00%. Data ini menegaskan pentingnya media komunikasi dalam membentuk persepsi masyarakat. Firmanzah (2012) menyatakan bahwa strategi komunikasi politik yang efektif harus mampu mengintegrasikan media tradisional dan media baru untuk menjangkau berbagai segmen pemilih. Pasangan Maulana-Diza terbukti lebih adaptif dalam memanfaatkan media sosial sekaligus menguatkan kehadiran fisik melalui alat peraga kampanye.

Selain itu, survei PUTIN juga mencatat bahwa alasan utama pemilih menentukan pilihan adalah program atau visi misi dengan 33,00%, diikuti sosok calon yang merakyat 15,50%, serta kinerja yang bagus 12,70%. Hal ini memperlihatkan bahwa pemilih Kota Jambi menilai kandidat tidak hanya dari faktor figur, tetapi juga dari sejauh mana program yang ditawarkan dapat diimplementasikan secara nyata. Program Maulana-Diza yang konkret, seperti "100 Juta per RT", lebih mudah diterima publik dibandingkan program pasangan Har-Guntur yang dinilai kurang aplikatif.

Dengan demikian, dinamika politik lokal dalam Pilkada Kota Jambi 2024 menunjukkan interaksi kompleks antara figur kandidat, program yang ditawarkan, serta strategi komunikasi politik. Pasangan Maulana-Diza unggul karena mampu menggabungkan ketiga aspek tersebut, sedangkan pasangan Har-Guntur mengalami kekalahan akibat lemahnya konsolidasi internal, strategi komunikasi yang tidak maksimal, dan program yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Fenomena Kekalahan Pasangan Har-Guntur dalam Pilkada Kota Jambi 2024

Pilkada Kota Jambi 2024 memperlihatkan dinamika politik lokal yang cukup kompleks, terutama pada persaingan dua pasangan calon utama. Pasangan H. Abdul Rahman (Har) dan Andi Muhammad Guntur (Guntur) yang sejak awal dianggap sebagai salah satu kandidat potensial, justru mengalami kekalahan dengan selisih suara yang signifikan. Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi, pasangan Har-Guntur hanya memperoleh 114.873 suara atau 26,74%, sedangkan pasangan Maulana-Diza berhasil meraih 314.226 suara atau 73,26%. Kesenjangan elektoral ini tidak hanya menunjukkan lemahnya daya tarik pasangan Har-Guntur di mata publik, tetapi juga menggambarkan betapa kuatnya dominasi politik yang dibangun pasangan Maulana-Diza selama proses kampanye.

Jika dilihat dari faktor internal, kelemahan utama pasangan Har-Guntur adalah lemahnya koordinasi tim pemenangan. Mesin partai pengusung yang terdiri dari PDIP dan Partai NasDem tidak sepenuhnya bergerak solid hingga ke level akar rumput. Dukungan struktural yang semestinya menjadi motor penggerak elektabilitas tidak mampu dimaksimalkan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, distribusi logistik kampanye dinilai tidak merata sehingga basis pemilih potensial tidak sepenuhnya terjamah. Hal ini sejalan dengan wawancara yang ditampilkan dalam skripsi Anda, di mana beberapa simpatisan menyatakan bahwa kerja tim di lapangan masih kurang intensif. Lemahnya koordinasi ini diperparah dengan strategi

kampanye yang lebih banyak menonjolkan figur tanpa diimbangi program-program konkret yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Di sisi eksternal, pasangan Maulana-Diza mampu memanfaatkan momentum politik dengan lebih efektif. Program unggulan mereka, "100 Juta per RT", menjadi magnet yang sangat kuat di tengah masyarakat karena menawarkan sesuatu yang konkret, realistis, dan mudah dipahami. Program ini tidak hanya dipersepsikan sebagai janji politik, tetapi juga sebagai solusi langsung terhadap kebutuhan pembangunan skala kecil di tingkat RT yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan cara ini, pasangan Maulana-Diza berhasil mengikat simpati pemilih sekaligus membangun legitimasi politik di basis-basis massa strategis.

Selain program konkret, citra personal kedua kandidat juga sangat berpengaruh. Maulana, yang memiliki latar belakang birokrasi dan dianggap dekat dengan masyarakat, dipersepsikan sebagai figur yang merakyat. Sementara itu, Diza sebagai figur muda membawa representasi generasi baru dalam politik lokal Jambi. Kombinasi keduanya memberikan nilai tambah yang membuat pasangan ini lebih diterima lintas kelompok sosial. Sebaliknya, pasangan Har-Guntur dianggap gagal membangun citra yang kuat, meskipun Har memiliki pengalaman politik panjang dan Guntur dikenal di lingkaran tertentu. Popularitas personal mereka tidak mampu menandingi strategi pencitraan Maulana-Diza yang lebih menyentuh akar persoalan sosial masyarakat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekalahan Har-Guntur bukan hanya karena lemahnya strategi internal, melainkan juga karena dominasi lawan politik yang lebih adaptif terhadap perubahan dinamika. Ketidakmampuan Har-Guntur dalam mengimbangi popularitas program lawan, ditambah lemahnya konsolidasi partai dan tim, akhirnya menempatkan pasangan ini pada posisi sulit. Hal ini sejalan dengan teori (Aspinall dan Berenschot 2019) yang menekankan bahwa dalam politik lokal Indonesia, kemenangan kandidat tidak hanya ditentukan oleh dukungan partai besar, tetapi juga oleh kemampuan membangun jaringan patronase, komunikasi efektif, dan program konkret yang mudah diterima publik.

Selain faktor internal dan eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula dinamika lain yang turut memengaruhi citra dan elektabilitas pasangan Har-Guntur, yakni praktik kampanye yang dilakukan di tempat ibadah. Dalam beberapa temuan di lapangan, pasangan Har-Guntur tercatat pernah melakukan aktivitas kampanye di area rumah ibadah. Praktik tersebut kemudian menimbulkan reaksi beragam di tengah masyarakat, bahkan ada laporan resmi dari warga yang menyampaikan keberatan kepada penyelenggara pemilu.

Secara normatif, aturan kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga Pasal 57 ayat (1) PKPU 13/2024 yang melarang penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas rumah ibadah dan mencegah terjadinya politisasi agama dalam kontestasi elektoral. Oleh karena itu, laporan masyarakat mengenai kegiatan kampanye Har-Guntur di tempat ibadah menimbulkan kesan bahwa pasangan ini kurang memperhatikan regulasi yang berlaku. Situasi ini bukan hanya berdampak pada legitimasi hukum, tetapi juga memengaruhi citra mereka di mata publik. Salah satu warga, Robert, menyampaikan bahwa penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan, "Tempat ibadah, seperti Klenteng, harus tetap bebas dari campur tangan politik. Ini adalah pelanggaran serius sesuai Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang melarang penggunaan fasilitas ibadah, pendidikan, dan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye" (HaloJambi, 2024).

Fenomena kampanye di tempat ibadah ini memperlihatkan bagaimana strategi yang semula dimaksudkan untuk memperluas jangkauan dukungan justru berbalik menjadi isu negatif. Publik, khususnya kelompok yang menolak politisasi ruang sakral, menilai tindakan tersebut tidak etis dan menciderai nilai-nilai demokrasi yang sehat. Dalam konteks politik lokal, hal ini memperkuat narasi bahwa pasangan Har-Guntur tidak memiliki strategi kampanye yang matang serta cenderung melakukan langkah-langkah yang berisiko tinggi terhadap kepercayaan masyarakat. Kehadiran laporan masyarakat terhadap aktivitas kampanye di tempat ibadah juga memperkuat persepsi bahwa pasangan Har-Guntur tidak sekuat lawannya dalam menjaga konsistensi citra. Jika Maulana-Diza tampil dengan program-program konkret yang dipandang positif, maka Har-Guntur justru terbebani oleh isu negatif yang membuat elektabilitas mereka semakin tergerus. Sebagaimana dijelaskan oleh (Firmanzah 2012), dalam komunikasi politik modern, persepsi publik terhadap integritas kandidat sama pentingnya dengan strategi kampanye itu sendiri. Praktik kampanye di tempat ibadah dan adanya laporan masyarakat terkait hal tersebut menjadi salah satu faktor tambahan yang memperburuk posisi pasangan Har-Guntur dalam Pilkada Kota Jambi 2024. Kekalahan mereka pada akhirnya dapat dipahami sebagai hasil akumulasi dari lemahnya konsolidasi internal, dominasi program lawan yang lebih unggul, serta beban isu negatif akibat strategi kampanye yang kurang tepat.

Hasil Pilkada Kota Jambi 2024 menjadi cerminan nyata bahwa dinamika politik lokal tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan simbolik atau dukungan struktural partai politik. Pada dasarnya, partai memang berperan penting sebagai kendaraan elektoral yang menyediakan sumber daya, jaringan kader, dan legitimasi formal. Namun, pengalaman yang terjadi pada pasangan Har-Guntur memperlihatkan bahwa dominasi partai besar seperti PDIP dan Partai NasDem tidak otomatis menjamin kemenangan. Faktor kunci yang menentukan justru terletak pada kemampuan kandidat dalam membangun kedekatan emosional, menghadirkan program aplikatif yang dapat dijalankan, serta membentuk persepsi publik melalui komunikasi politik yang efektif (Suhantori, et. al, 2025).

Dalam konteks ini, pasangan Maulana-Diza memberikan contoh bagaimana strategi politik lokal dapat bekerja secara lebih adaptif. Mereka mampu merumuskan program "100 Juta per RT" yang sederhana, mudah dipahami, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Program ini berfungsi ganda, yaitu sebagai janji politik yang konkret sekaligus instrumen komunikasi yang memperkuat kedekatan figur kandidat dengan warga. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat pemilih Kota Jambi menuntut solusi yang realistis dan bukan sekadar retorika. Sejalan dengan pandangan (Firmanzah 2012), strategi komunikasi politik yang efektif adalah yang mampu menghubungkan bahasa politik kandidat dengan kebutuhan riil masyarakat pemilih.

Kegagalan Har-Guntur dalam memenuhi tuntutan tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, secara substantif mereka belum mampu menghadirkan program unggulan yang menandingi popularitas program lawan. Janji-janji politik yang mereka usung dianggap masih terlalu umum dan tidak menyentuh akar persoalan warga di tingkat mikro. Kedua, secara strategis mereka kurang berhasil memanfaatkan media komunikasi, baik media sosial maupun media tradisional, untuk membangun narasi positif di tengah masyarakat. Survei Public Trust Institute menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih Kota Jambi memperoleh informasi politik dari baliho, media sosial, dan percakapan antarwarga (Agustri, 2024). Namun, penetrasi Har-Guntur melalui media ini terbilang lemah, sehingga pesan politik mereka kalah bersaing dengan narasi lawan yang lebih kuat. Selain itu, munculnya isu kampanye di tempat ibadah

yang melibatkan pasangan Har-Guntur semakin memperburuk citra mereka. Laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ini menciptakan persepsi negatif bahwa pasangan tersebut kurang memperhatikan regulasi pemilu dan etika politik. Padahal, kepercayaan publik terhadap integritas kandidat merupakan salah satu modal sosial yang penting dalam politik lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh (Aspinall dan Berenschot 2019), pemilih Indonesia tidak hanya memperhitungkan imbalan material atau janji program, tetapi juga menilai kredibilitas figur kandidat dalam menjaga norma sosial dan aturan formal. Dengan kata lain, isu kampanye di tempat ibadah memperlemah legitimasi moral Har-Guntur di mata sebagian masyarakat, terutama kelompok yang menolak politisasi agama.

Jika dibandingkan dengan beberapa pilkada di daerah lain, fenomena yang menimpa Har-Guntur juga memperlihatkan pola yang hampir sama. Kandidat dengan dukungan partai besar sering kali mengalami kekalahan ketika gagal menghadirkan strategi kampanye yang adaptif dan program yang membumi. Sebaliknya, kandidat dengan pendekatan yang lebih personal, programatis, dan komunikatif justru berhasil memperoleh dukungan luas. Dalam hal ini, Pilkada Kota Jambi 2024 semakin menegaskan bahwa faktor figur dan kedekatan sosial politik masih menjadi variabel utama dalam menentukan pilihan pemilih.

Dengan demikian, kekalahan Har-Guntur dapat dipahami sebagai hasil dari akumulasi berbagai kelemahan, baik internal maupun eksternal. Lemahnya konsolidasi tim pemenangan, program politik yang tidak aplikatif, serta beban isu negatif akibat kampanye di tempat ibadah telah berkontribusi besar terhadap rendahnya elektabilitas mereka. Sebaliknya, keunggulan Maulana-Diza dalam mengelola program, citra personal, dan strategi komunikasi telah menempatkan mereka sebagai pilihan utama masyarakat Kota Jambi. Hasil ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam dinamika politik lokal, kemenangan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan struktural, melainkan juga oleh kemampuan kandidat dalam membangun kepercayaan publik melalui integrasi program, figur, dan komunikasi politik yang tepat.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekalahan pasangan Har-Guntur dalam Pilkada Kota Jambi 2024 tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari akumulasi kelemahan internal yang tidak mampu diimbangi dalam menghadapi tekanan eksternal yang lebih kuat. Dari sisi internal, lemahnya konsolidasi tim pemenangan, kurang solidnya mesin partai pengusung, serta strategi kampanye yang tidak sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan konkret masyarakat telah menghambat kemampuan pasangan ini dalam membangun basis dukungan yang stabil. Kondisi tersebut mencerminkan persoalan klasik dalam politik lokal, di mana kelemahan organisasi dan strategi tidak hanya berdampak pada rendahnya mobilisasi pemilih, tetapi juga pada kegagalan membentuk kepercayaan publik secara berkelanjutan. Pada saat yang sama, dari sisi eksternal, pasangan Maulana-Diza tampil lebih unggul melalui kombinasi strategi yang lebih terintegrasi, mulai dari penawaran program yang konkret seperti "100 Juta per RT", pembangunan citra personal yang dekat dengan masyarakat, hingga pemanfaatan media komunikasi yang lebih adaptif dan menjangkau berbagai segmen pemilih. Keunggulan ini diperkuat oleh kemampuan mereka dalam mengelola persepsi publik, terutama ketika pasangan Har-Guntur dihadapkan pada isu negatif seperti dugaan praktik kampanye di tempat ibadah yang memicu respons kritis dari masyarakat dan berkontribusi pada penurunan citra politik.

Dengan demikian, dinamika Pilkada Kota Jambi 2024 menegaskan bahwa kemenangan dalam kontestasi politik lokal tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan struktural partai, tetapi semakin bergantung pada kapasitas kandidat dalam mengintegrasikan program yang aplikatif, citra politik yang kredibel, dan strategi komunikasi yang efektif. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam perilaku pemilih ke arah yang lebih rasional dan evaluatif, di mana pemilih tidak hanya mempertimbangkan afiliasi politik, tetapi juga kinerja, program, dan integritas kandidat. Pada saat yang sama, hasil penelitian ini juga menyoroti bahwa kualitas demokrasi lokal masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana, terutama terkait keterbatasan kompetisi yang substantif dan masih munculnya praktik kampanye yang problematis dari sisi regulasi. Oleh karena itu, penguatan demokrasi lokal ke depan tidak hanya memerlukan perbaikan pada level institusional, tetapi juga peningkatan kualitas praktik politik oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Afriandi, R. A. (2024, November 27). Pengamat politik: Dinamika Pilkada Jambi dan tantangan dalam penegakan demokrasi. *Tribun Jambi*.
<https://jambi.tribunnews.com/2024/11/27/pengamat-politik-dinamika-pilkada-jambi-dan-tantangan-dalam-penegakan-demokrasi>
- Agustri. (2024, September 28). Hasil survei PUTIN, pasangan Maulana-Diza unggul dalam elektabilitas Pilwako Jambi 2024. *JambiTV* (Disway).
<https://jambitv.disway.id/read/8200/hasil-survei-putin-pasangan-maulana-diza-unggul-dalam-elektabilitas-pilwako-jambi-2024>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmanzah, P. D. (2007). *Marketing politik: antara pemahaman dan realitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14(1), 289–310.
<https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508>
- HaloJambi. (2024, September 30). Pasangan Har-Guntur dilaporkan ke Bawaslu Kota Jambi

buntut dugaan pelanggaran kampanye di klenteng. HaloJambi.
<https://halojambi.id/index.php/politik/14668-pasangan-har-guntur-dilaporkan-ke-bawaslu-kota-jambi-buntut-dugaan-pelanggaran-kampanye-di-klenteng>

Huberman, M., & Miles, M. (1994). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2nd ed)*. Sage Publication.

Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia*. Honolulu, HI: East-West Center.

Suhantoro, Sari, E. N., Gunawan R., Firdauzy, M., Mufidah, I., Andini, D. C., & Magfiroh, F. (2025). *Konsep Komunikasi Politik Dalam Proses Pembangunan*. Kramantara JS.

Tribun Jambi. (2024, Desember 6). Tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2024 di Kota Jambi rendah; angka golput capai 37 persen. *Tribun Jambi*.
<https://jambi.tribunnews.com/2024/12/06/tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-di-kota-jambi-rendah-angka-golput-capai-37-persen>

Ufen, A. (2021). The downfall of Pakatan Harapan in Malaysia. *Asian Survey*, 61(2), 273–296.
<https://doi.org/10.1525/as.2021.61.2.273>